

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah suatu isyarat bahwa semakin pentingnya pendekatan pembangunan dengan basis kinerja dibandingkan pendekatan pengembangan wilayah, pendekatan pembangunan dan pendekatan sektoral. Pembangunan berbasis kinerja memandang pentingnya keterpaduan intersektoral, interspasial, serta antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Reformasi pembangunan yang mengarah kepada tuntutan transparansi, demokratisasi, partisipasi, otonomi daerah dan *good governance*, menuntut terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan nasional termasuk pembangunan agribisnis. Pembangunan pertanian ke depan diarahkan kepada peningkatan sebesar-besarnya peran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah yang sebelumnya berperan sebagai perencana dan pelaksana harus berubah menjadi fasilitator, stimulator dan promotor pembangunan pertanian dan pelaksana pembangunan pertanian adalah masyarakat. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dilakukan oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian, perlu ditingkatkan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku usaha pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disampaikan kepada atasan masing-masing, serta kepada lembaga penilai/evaluasi akuntabilitas kinerja, yang akhirnya kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.

**B. Dasar Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III, dan Unit Pelaksana Teknis serta rincian tugas eselon IV Pada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2016;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2016.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik. Sistem AKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKIP bermanfaat antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LKIP Dinas Pertanian Kota Bukittinggi tahun 2016 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota

Bukittinggi dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah).

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pertanian Kota Bukittinggi Tahun 2016 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **D. Sistematika Penulisan**

LKIP Dinas Pertanian Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2016. Penyusunan LKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/ program/kegiatan dengan rencananya, yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2015 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LKIP Dinas Pertanian Kota Bukittinggii tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan
- E. Tugas dan Wewenang Organisasi
- F. Susunan Organisasi
- G. Pegawai

BAB II RENCANA STRATEGIK

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Kebijakan dan Program
- D. Rencana Kinerja Tahunan
- E. Perjanjian Kinerja 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Indikator Kinerja
- B. Metodologi Pengukuran Kinerja
- C. Analisis Pencapaian Kinerja
- D. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016
- E. Kendala yang Dihadapi
- F. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

### **E. Tugas Pokok dan Wewenang Organisasi**

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, peternakan, tanaman pangan dan penyuluhan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas maka Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, peternakan, tanaman pangan dan penyuluhan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, peternakan, tanaman pangan dan penyuluhan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, peternakan, tanaman pangan dan penyuluhan.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian pada masing-masing bidang, maka berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Unit Pelaksana Teknis serta Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi telah ditetapkan bahwa :

↳ **Kepala Dinas;** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pilihan pemerintahan daerah dibidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan dan peternakan, tanaman pangan dan penyuluhan berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis dibidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan dan peternakan, tanaman pangan dan penyuluhan berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan.

- b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah daerah dibidang pertanian.
- c. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertanian, dan penyuluhan berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan;
- d. Merumuskan, melaksanakan dan mangkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan pertanian dan penyuluhan berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

↳ **Sekretariat;** mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pertanian dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang ketatausahaan;
- b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan meliputi pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang urusan/kewenangan pemerintah daerah;
- d. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggarakan kerjasama di bidang pengelolaan ketatausahaan sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- e. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program program dan atau kegiatan/tugas dilingkup Sekretariat;

- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Perencanaan

↳ **Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan kehutanan;

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pertanian, Perkebunan dan kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan administrasi tugas pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah daerah;
- c. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan program teknologi produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan penyelenggaraan;
- d. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perlindungan dan mekanisasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- e. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program konservasi lahan dan tata guna air;
- f. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama dibidang pengelolaan pertanian, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- g. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perencanaan pengadaan teknis sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura serta konservasi lahan dan tata guna air.
- h. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas dilingkup Bidang Pertanian, Perkebunan dan kehutanan;

- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian
- b. Seksi Perkebunan dan Kehutanan
- c. Seksi Sarana Produksi dan Alsintan

↳ **Bidang Peternakan dan Perikanan Darat;** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang peternakan dan perikanan darat.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan administrasi tugas pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan darat;
- b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah daerah;
- c. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perlindungan dan mekanisasi peternakan dan perikanan darat;
- d. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama dibidang peternakan dan perikanan darat sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- e. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perencanaan pengadaan teknis sarana dan prasarana produksi peternakan dan perikanan darat serta konservasi lahan dan tata guna air.
- f. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas dilingkup Bidang Peternakan dan perikanan darat;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Peternakan dan Perikanan Darat terdiri dari :

- a. Seksi Peternakan
- b. Seksi Perikanan Darat
- c. Seksi Kesehatan Hewan

↳ **Bidang Penyuluhan;** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program penyuluhan dalam arti memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, serta peternakan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan administrasi tugas pemerintahan di bidang penyuluhan;
- b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah daerah;
- c. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penyuluhan terhadap tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- d. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan mekanisme program penyuluhan;
- e. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama dibidang penyuluhan sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- f. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas dilingkup bidang penyuluhan;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Penyuluhan terdiri dari:

- a. Seksi Program Tata Penyuluhan
- b. Seksi Kelembagaan Penyuluhan
- c. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil

**F. Susunan Organisasi**

Adapun Struktur Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

**a) Kepala Dinas**

**b) Sekretariat, membawahi :**

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan
3. Sub Bagian Keuangan.

**c. Bidang- bidang terdiri dari :**

**1. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan membawahi :**

- Seksi pertanian
- Seksi perkebunan dan kehutanan
- Seksi sarana produksi dan alsintan

**2. Bidang Peternakan dan Perikanan Darat, membawahi :**

- Seksi peternakan
- Seksi perikanan darat
- Seksi kesehatan hewan

**3. Bidang Penyuluhan, membawahi :**

- Seksi program tata penyuluhan
- Seksi kelembagaan penyuluhan
- Seksi pasca panen dan pemasaran hasil

**4. Dinas Pertanian memiliki 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) yaitu :**

**4.1 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)**

- 1) UPT Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional dinas sesuai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam bidang pengelolaan pelayanan pemotongan hewan ternak.

#### 4.2 UPTD Balai Benih Ikan Hias (BBIH)

- 2) Kepala UPTD Balai Benih Induk Ikan Hias adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Balai Benih Induk Ikan Hias yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

#### 4.3 UPTD Poskeswan

- 3) UPTD Pos Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sbagian tugas operasional dinas sesuai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam bidang pengelolaan pelayanan dan pengobatan pada Pos Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

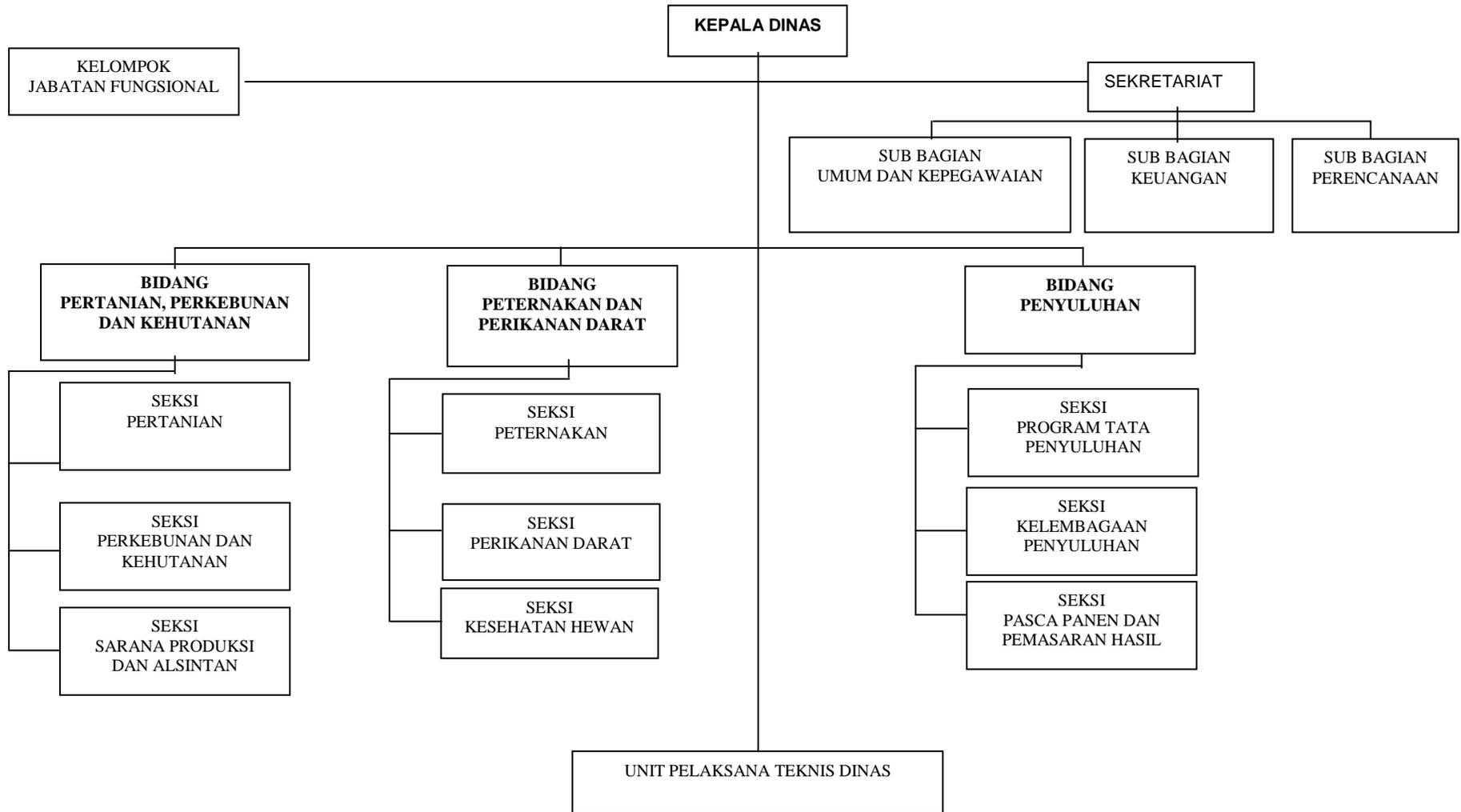
Struktur UPTD tersebut terdiri dari :

- Kepala
- Sub bagian tata usaha
- Kelompok jabatan fungsional

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari**

- a. Penyuluh Pertanian
- b. Medik Veteriner
- c. Para Medik Veteriner
- d. Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP)

**Struktur Organisasi**



### G. Pegawai

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pertanian Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 75 orang. Pegawai PNS 65 orang dan Non PNS 10 Orang dengan rincian sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan Desember 2015 (orang)	Keadaan 31 Desember 2016 (orang)
IV	6	9
III	45	45
II	9	8
I	4	3
Honor	1	1
Pegawai Tidak Tetap	9	9
Jumlah	74	75

Latar belakang pendidikan aparatur PNS pada Dinas Pertanian untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu:

Pendidikan	Keadaan 31 Desember 2015(orang)	Keadaan 31Desember 2016 (orang)
S3	0	0
S2	2	3
S1	38	41
D IV	3	3
D III	9	7
D II	0	0
D I	0	0
SLTA	8	8
SLTP	0	1
SD	4	2
Jumlah	64	75

**BAB II**

**RENCANA STRATEGIS**

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Pertanian Kota Bukittinggi mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2016.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian Kota Bukittinggi mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, kekurangan, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pertanian Kota Bukittinggi mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran serta target yang akan dicapai.

**A. Visi dan Misi**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Dinas Pertanian Kota Bukittinggi mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu:

---

**Terwujudnya Pertanian Perkotaan yang Tangguh Berbasis Sumberdaya Lokal dan Berwawasan Lingkungan**

---

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Pertanian Kota Bukittinggi ditetapkan sebanyak 2 (dua) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan
2. Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

**B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis pembangunan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi seperti pada tabel berikut:

Tujuan 1	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui kegiatan intensifikasi pertanian, peningkatan penggunaan teknologi dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian
Sasaran 1	Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
Tujuan 2	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

### Sasaran Dinas Pertanian Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Meningkatkan Produksi/Produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.	Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	a.	Produktivitas hasil produksi pertanian komoditi pertanian							
				a. Padi (ton/ha)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
				b. Jagung (ton/ha)	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	
				c. Ubi kayu (ton/ha)	37	37	37	37	37	37	
				d. Ubi jalar (ton/ha)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
				e. Tanaman hias (m2)	5000	6000	6500	7000	7500	7700	
				b.	Produktivitas hasil produksi perkebunan - Kopi (kg/ha)	120	124	124	125	130	132
				c.	Produksi hasil produksi peternakan:						
				a.	Daging sapi (kg)	888.976	888.976	888.976	888.976	888.976	888.976
				b.	Daging Kerbau (kg)	302.560	302.560	302.560	302.560	302.560	302.560
	c.	Daging kambing (kg)	3.319	3.319	3.319	3.319	3.319	3.319			
	d.	Daging ayam buras (kg)	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539			
	e.	Daging ayam ras pedaging (kg)	578	578	578	578	578	578			
	f.	Daging ayam ras petelur (kg)	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406			
	g.	Daging itik (kg)	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558			
	d.	Produksi telur (kg):									
	a.	Telur ayam ras	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577			
	b.	Telur ayam buras	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284			
	c.	Telur itik	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228			
	e.	Produksi susu sapi	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180			
	f.	Produksi hasil produksi perikanan									
	a.	Ikan hias (ekor)	145.400	166.600	187.900	209.000	231.000	231.000			
	b.	Ikan konsumsi (ekor)	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	200.000			
2.	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan									
			Peningkatan agroindustri yang berbasis sumber daya lokal:								
			a. Jumlah UP3HP yang aktif	10	12	13	14	15	15		

### C. Kebijakan dan Program

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

### **Kebijakan**

Kebijakan yang dikembangkan terdiri dari :

- a. Peningkatan kualitas SDM baik aparatur pertanian maupun petani dengan melaksanakan diklat dan bintek
- b. Pengembangan manajemen system agribisnis dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian
- c. Penataan kelembagaan petani, system pemasaran dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian
- d. Pengembangan infrastruktur pertanian untuk mendukung kemajuan pertanian dari hulu sampai hilir
- e. Pengembangan regulasi penunjang dalam rangka perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang tinggi
- f. Peningkatan upaya konservasi, rehabilitasi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
- g. Melakukan promosi produk pertanian ataupun produk olahan pertanian baik secara lokal maupun nasional dan internasional.

### **Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi**

Program dan kegiatan tahun anggaran 2016 sebagai penjabaran penyelenggaraan urusan penunjang dan pilihan Dinas Pertanian sebagai berikut :

#### **Program Penunjang.**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan & Perlengkapan Kantor
  - f. PenyediaanAlat Tulis Kantor

- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - j. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas luar kota Bukittinggi
  - k. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
  - l. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  - m. Penyediaan penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan perlengkapan kantor
  - b. Pengadaan Peralatan Kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 bulan berikutnya.
  - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
  - d. Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

### **Program Pilihan**

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- a. Revitalisasi, Peningkatan Kelas dan Penilaian, Pemberian Penghargaan Kelembagaan Tani
  - b. Pelatihan dan pembinaan Gapoktan/ LKMA
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- a. Promosi Pemasaran Hasil Pertanian
  - b. Pekan Flora dan Flori Tingkat Nasional dan Tingkat Propinsi

- c. Layanan Informasi Pasar
  - d. Peningkatan Operasional Sarana dan Prasarana Pasar Ternak
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dana Sinergis TP)
  - b. Penangkaran JABAL Benih Padi
  - c. Pengembangan Tanaman Hias
  - d. Pengembangan Tanaman Biofarmaka
  - e. Pengembangan Kultur Jaringan
  - f. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
  - g. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
  - h. Pembinaan Pengembangan Komoditi Kopi
  - i. Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK 2016)
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- a. Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
  - b. Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)
  - c. Penunjang Operasional BPP Model
  - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung BPP (DAK 2016)
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
  - b. Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung
  - c. Penunjang Operasional Poskeswan
  - d. Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan
  - e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Poskeswan (DAK 2016)
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- a. Pemeliharaan Kuda Bibit Pejantan
  - b. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- a. Penunjang Operasional Rumah Potong Hewan
  - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Ruminasia (DAK 2015)

8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
  - a. Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP) untuk Pengolahan Tanaman Pangan
9. Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah
  - a. Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian
10. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - a. Pemeliharaan Tahun II Penghijauan Bantaran Sungai Kawasan Ngarai
  - b. Pencanaan Bulan Menanam Pohon
  - c. Pemeliharaan Bibit Tanaman Penghijauan Untuk Kota Bukittinggi
11. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
  - a. Penunjang Operasional Sarana dan Prasarana BBIH
12. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - a. Uji Mutu Produk Perikanan
  - b. Lomba Masak Ikan
13. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
  - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK Bidang Perikanan 2016)

**D. Rencana Kinerja Tahunan**

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Bukittinggi selama tahun 2016. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Pertanian Kota Bukittinggi tahun 2016 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: Formulir RKT).

**E. Perjanjian Kinerja 2016****Penetapan Kinerja Dinas Pertanian Kota Bukittinggi Tahun 2016:**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	
1.	Meningkatnya kesejahteraan petani	a.	Dilakukan revitalisasi kelompok dan kelembagaan tani	Jumlah kelompok tani yang direvitalisasi	95 kelompok
		b.	Dilakukan pelatihan dan pembinaan Gapoktan dan LKMA	Jumlah kelompok tani dan LKMA yang dilatih dan dibina	16 kelompok
		c.	Dilaksanakan pengembangan sayuran ramah lingkungan	Jumlah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan pengembangan sayuran ramah lingkungan	2 kelompok
2.	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	a.	Terlaksananya penyebaran informasi harga pasar komoditi pertanian, peternakan dan perikanan di media elektronik	Frekuensi penyebaran informasi harga pasar komoditi pertanian, peternakan dan perikanan di media elektronik	240 kali di media TV dan 160 kali di radio
		b.	Mengikuti kegiatan pekan flora Tk. I dan Pekan flora dan flori nasional	Jumlah kegiatan pekan flora dan flori yang diikuti	2 kegiatan
		c.	Mengikuti ekspo dan pameran	Jumlah ekspo yang diikuti	3 kegiatan tingkat nasional dan 1 kegiatan tingkat Kota Bukittinggi
3.	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perkebunan	a.	Dilaksanakan bimbingan dan pelatihan kelompok usaha (UP3HP)	Jumlah rapat pelatihan dan pertemuan yang dilaksanakan	2 kali pelatihan dan 5 kali pertemuan
4.	Meningkatnya produksi pertanian perkebunan	a.	Dilaksanakannya penangkaran JABAL benih padi	Jumlah benih yang ditangkar	1000 kg
		b.	Dilaksanakannya pengembangan tanaman hias	Jumlah tanaman hias pot dan tanaman landscape yang dikembangkan	1 paket
		c.	Pengembangan tanaman Biofarmaka	Jenis tanaman biofarmaka yang disalurkan ke dasawisma Jumlah tanaman yang tersalurkan	6 jenis
		d.	Pengembangan kultur jaringan	Jumlah peserta pelatihan kultur jaringan	20 org
		c.	Terkendalinya serangan OPT (tikus dan ulat) pada areal tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah lokasi pengendalian OPT	4 lokasi
		d.	Dilaksanakannya pengawasan pupuk dan pestisida	Jumlah rapat koordinasi dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di tingkat jelompok tani	2 kali
		e.	Dilaksanakannya pembinaan lanjutan pengembangan komoditi kopi	Jumlah komoditi kopi yang dikembangkan	500 batang
5.	Pemberdayaan Penyuluh	a.	Dilaksanakannya penyusunan dan	Tersusunnya RKPP dan terkendalikannya RKPP	1 tahun

	pertanian/perkebunan lapangan		pengendalian program dan rencana kerja penyuluh pertanian		
		b.	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Terlaksananya: - Rapat evaluasi - Training - Pelatihan petani - Pertemuan KTNA	- 4 kali - 22 kali - 2 kali dan - 1 kali
6.	Tercapainya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	a.	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	Tersedia sarana dan prasarana vaksinasi	1 paket
		b.	Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	Pengambilan sampel PAH	2 kali
		c.	Penanggulangan Flu Burung	Pemusnahan unggas yang terinfeksi	1 kali
		d.	Pelatihan Dog Cather	Pelatihan Penangkapan anjing	8 orang
		e.	Penunjang Operasional Puskesmas	Operasional Poskeswan	1 tahun
7.	Meningkatnya produksi hasil peternakan	a.	Pemeliharaan kuda bibit pejantan	Jumlah Kuda bibit yang dipelihara	1 ekor
		b.	Promosi atas hasil produksi ternak unggulan daerah	Keikutsertaan pada acara promosi peternaka tingkat provinsi Sumatera Barat dan Nasional	1 kali
8.	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	a.	Penunjang operasional RPH	Operasional RPH	1 tahun
9.	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	a.	Terlaksananya pemeliharaan tahun II penghijauan bantaran sungai kawasan Ngarai	Jumlah tanaman yang dipelihara	2.600 batang
		b.	Terlaksananya penanaman bulan menanam pohon	Pelaksanaan bulan menanam pohon secara serentak di Kota Bukittinggi	1 kali
10.	Meningkatnya kualitas SDM pembudidaya ikan	a.	Terlaksananya Bimtek budidaya ikan hias	Jumlah peserta Bimtek budidaya ikan hias	20 orang
11.	Pengembangan Budidaya Perikanan	a.	Terlaksananya operasional BBIH	Operasional BBIH	1 tahun
12.	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	a.	Terlaksananya uji mutu hasil perikanan	Uji mutu hasil perikanan	2 sampel
		b.	Terlaksananya lomba masak ikan dan jingle	lomba masak ikan dan promosi	3 event

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

---

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung-jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

**A. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. **Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*Benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kota Bukittinggi tahun 2016 ini hanya bisa dilaksanakan pada tingkat **Indikator Masukan (*input*)**, **Indikator Keluaran (*Output*)** dan **Indikator hasil (*Outcome*)**.

#### **B. Metodologi Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

### C. Analisa Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikangambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghasilkan persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

### D. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi serta menentukan persentase hasil pencapaiannya, dengan kategori penilaian:

NO	SKOR	NILAI	INTERPRETASI KARAKTERISTIK INSTANSI
1	> 85	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2	>75 - 85	A	Sangat baik: Akuntabilitas kinerjanya baik,berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang handal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi

3	>65 - 75	B	Baik: akuntabilitas kerjanya baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk system dan perlu banyak berfokus perbaikan soft system
4	>50 - 65	CC	Cukup baik (memadai): Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5	>30 - 50	C	Agak kurang: Memiliki system untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0 - 30	D	Kurang: system dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Analisis pencapaian target untuk masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya kesejahteraan petani
-----------	-----------------------------------

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Dilakukan revitalisasi kelompok dan kelembagaan tani	kelompok	95	99	104
2	Dilakukan pelatihan dan pembinaan Gapoktan dan LKMA	kelompok	16	16	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 2 Indikator Sasaran Strategis nomor 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	2
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 – 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		2

Untuk tahun 2016 realisasi capaian kinerja sasaran 1 dengan klasifikasi penilaian AA karena realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 2	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
-----------	--

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya penyebarluasan informasi harga pasar komoditi pertanian, peternakan dan perikanan di media elektronik - TV - Radio	Kali	240; 160	240; 160	100
2	Mengikuti kegiatan pekan flora Tk. I dan Pekan flora dan flori nasional	kegiatan	2	2	100
3	Mengikuti ekspo dan pameran - Tingkat nasional	kegiatan	1	1	100

-	Tingkat kota				
---	--------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 3 Indikator Sasaran Strategis nomor 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 2

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	3
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 – 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		3

Capaian kinerja Sasaran 2 dengan klasifikasi penilaian AA untuk 3 kategori indikator sasaran 2 karena target telah mencapai 100%.

Sasaran 3	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perkebunan
-----------	---

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Dilaksanakan bimbingan dan pelatihan kelompok usaha (UP3HP) - Pelatihan - Pertemuan	kali	2; 5	2;3	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 Indikator Sasaran Strategis nomor 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 3

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	1
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 – 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		1

Capaian kinerja untuk Sasaran 3 dengan predikat AA (memuaskan) sesuai dengan realisasi pelatihan dan pertemuan mencapai 100%

Sasaran 4	Meningkatnya produksi pertanian perkebunan
-----------	--

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Dilaksanakannya penangkaran JABAL benih padi	kg	1000	850	85
2	Dilaksanakannya pengembangan tanaman hias	paket	1	1	100
3	Terkendalinya serangan OPT (tikus dan ulat) pada areal tanaman pangan dan hortikultura	lokasi	4	2	50
4	Terlaksananya pengembangan Tanaman Biofarmaka	jenis	6	6	100
5	Terlaksananya pelatihan Kultur jaringan	orang	20	20	100

6	Dilaksanakannya pengawasan pupuk dan pestisida	Kali	2	2	100
7	Dilaksanakannya pembinaan lanjutan pengembangan komoditi kopi	batang	500	500	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 7 Indikator Sasaran Strategis nomor 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 4 memuaskan

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	5
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	1
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	1
6	0 – 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		7

Capaian kinerja sasaran nomor 4 tercapai 100% untuk 5 indikator kinerja. Indikator kinerja nomor 2 tercapai 85% disebabkan karena benih yang layak di jadikan benih hanya 85%. Indikator kinerja nomor 5 tercapai 50% disebabkan realisasi kegiatan sesuai dengan kasus dilapangan, pada tahun 2016 kasus serangan OPT (tikus dan ulat) yang terjadi sebanyak 2 kali dan telah tertangani dengan baik.

Sasaran 5	Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
-----------	---

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 5 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Dilaksanakannya penyusunan dan pengendalian program dan rencana kerja penyuluh pertanian	dokumen	30	30	100
2	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat evaluasi</li> <li>- Training</li> <li>- Pelatihan petani</li> <li>- Pertemuan KTNA</li> </ul>	kali	4; 22; 2; 1	4; 22; 2; 1	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 2 Indikator Sasaran Strategis nomor 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 5

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	2
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 - 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		2

Capaian kinerja sasaran 5 dengan 2 indikator kinerja AA (memuaskan), 2 indikator pada sasaran nomor 5 tercapai 100%

Sasaran 6	Tercapainya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan meningkatnya pelayanan kesehatan hewan
-----------	--

Analisis pencapaian target 5 indikator kinerja pada sasaran 6 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	paket	1	1	100
2	Pengawasan bahan pangan asal hewan	kali	2	2	100
3	Penanggulangan flu Burung	kali	1	1	0
4	Pelatihan Dog Cather	orang	8	8	100
5	Penunjang Operasional Puskesmas	tahun	1	1	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari Indikator Sasaran Strategis nomor 6 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 6

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	4
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 – 30	D (Kurang)	1
	Jumlah		5

Capaian kinerja sasaran 6 adalah 4 indikator kinerja AA (memuaskan), indikator kinerja nomor 5 dengan predikat D (kurang) hal ini karena kegiatan penanggulangan flu burung tidak dilaksanakan sebab tidak ada kasus yang terjadi.

Sasaran 7	Meningkatnya produksi hasil peternakan
-----------	--

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 7 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Capaian Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara	Ekor	1	1	100
2.	Terlaksananya promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Kali	1	1	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 2 Indikator Sasaran Strategis nomor 7 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 7

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	2
2	>75 - 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 - 75	B (baik)	0
4	>50 - 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 - 50	C (Agak kurang)	0
6	0 - 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		2

Capaian kinerja sasaran 7 dengan 2 indikator kinerja dengan predikat AA (memuaskan).

Sasaran 8	Meningkatnya Pemasaran hasil Produksi Peternakan
-----------	--

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 8 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Penunjang operasional Rumah Potong Hewan	tahun	1	1	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari Indikator Sasaran Strategis nomor 8 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 8

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	1
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 – 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		1

Capaian kinerja sasaran 8, dengan predikat AA (memuaskan), operasional Rumah Potong Hewan berjalan selama 1 tahun.

Sasaran 9	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan
-----------	--

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 8 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Capaian Kinerja Sasaran 9

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya pemeliharaan tahun II penghijauan bantaran sungai kawasan	batang	2600	175	6,73

	Ngarai				
2	Terlaksananya pencaangan bulan menanam pohon	kali	1	1	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 2 Indikator Sasaran Strategis nomor 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 9

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	1
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 – 30	D (Kurang)	1
	Jumlah		2

Capaian kinerja sasaran 9, 1 indikator dengan predikat D (kurang disebabkan realisasi 6,73%. Dan 1 indikator dengan predikat AA (memuaskan) dengan realisasi 100%

Sasaran 10	Meningkatnya kualitas SDM pembudidaya ikan
------------	--

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Capaian Kinerja Sasaran 10

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Bimtek budidaya ikan hias	Orang	20	20	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) Indikator Sasaran Strategis nomor 10 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 10

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	1
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 – 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		1

Capaian kinerja sasaran 10, dengan predikat AA (memuaskan), dengan realisasi 100%

Sasaran 11	Pengembangan Budidaya Perikanan
------------	---------------------------------

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran 11 adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Capaian Kinerja Sasaran 11

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya operasional BBIH	tahun	1	1	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 Indikator Sasaran Strategis nomor 11 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 11

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	1
2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 – 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		1

Capaian kinerja sasaran untuk sasaran 11 AA ( memuaskan).

Sasaran 12	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
------------	---

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 12 adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Capaian Kinerja Sasaran 12

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya sosialisasi mutu dan uji mutu hasil perikanan	Orang	40	40	100
2	Terlaksananya lomba masak ikan dan jingle	Event; peserta	3; 54	3;54	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 2 Indikator Sasaran Strategis nomor 12 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Klasifikasi penilaian Capaian Kinerja Sasaran 12

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	>85	AA (memuaskan)	2

2	>75 – 85	A (Sangat Baik)	0
3	>65 – 75	B (baik)	0
4	>50 – 65	CC (cukup baik)	0
5	>30 – 50	C (Agak kurang)	0
6	0 – 30	D (Kurang)	0
	Jumlah		2

Capaian kinerja sasaran untuk sasaran 12 AA (memuaskan) dengan realisasi 100%.

#### **E. Kendala Yang Dihadapi**

Hambatan-hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pada sasaran 4 indikator kinerja 3 yaitu pengendalian serangan OPT (tikus dan ulat) pada areal tanaman pangan dan hortikultura disebabkan karena pada tahun 2016 kasus serangan hama hanya terjadi pada 2 lokasi sedangkan ditargetkan sebanyak 4 lokasi. Sehingga realisasi pada tahun 2016 hanya 50%.
2. Pada sasaran 6 pada indikator kinerja 3 terdapat penanggulangan flu burung dengan realisasi 0%. Hal ini disebabkan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan kasus yang timbul dilapangan selama tahun 2016, akan tetapi kasus flu burung tidak terjadi selama tahun 2016 sehingga realisasi 0%.
3. Pada sasaran 9 pada indikator 1 terdapat kegiatan terlaksananya pemeliharaan tahun II penghijauan bantaran sungai kawasan Ngarai. Ini hanya terealisasi 6,7% disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti terjadi/tertimpa lonsor pada bulan Februari 2016, tidak adanya pemeliharaan tahun I dan juga tidak adanya kesadaran masyarakat untuk merawat tanaman yang sudah ada, pembangunan dam dan jalan beton dan juga disebabkan oleh gangguan ternak kerbau masyarakat yang dipelihara/lepas dilokasi tersebut. Sehingga tanaman yang dapat dipelihara hanya 175 batang.
4. Realisasi keuangan mencapai 55,90% itu disebabkan :
  - Adanya beberapa kegiatan yang tergantung kepada kasus yang timbul dilapangan selama tahun 2016 yaitu Pengendalian OPT dan Penanggulangan Flu Burung.

- DAK Bidang Pertanian (sisa DAK 2015) Rp. 24.882.046,- Tidak terealisasi akibat ketidaksesuaian peraturan / petunjuk teknis dan dianggarkan pada perubahan APBD sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya
- Dak bidang Kelautan dan Perikanan Sisa Dak 2010-2014 sebesar Rp.2.694.497.292,-. Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena ketidaksesuaian peraturan / petunjuk teknis dan dianggarkan pada perubahan APBD sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya
- Dak bidang Kelautan dan Perikanan Sisa Dak 2015 sebesar Rp.42.177.546,- Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena ketidaksesuaian peraturan / petunjuk teknis dan dianggarkan pada perubahan APBD sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya
- Dana Alokasi Khusus (Sisa DAK 2010-2014) Bidang Kehutanan Tahun 2015 sebesar Rp. 584.352.874,- yang tidak dapat dilaksanakan akibat ketidaksesuaian peraturan / petunjuk teknis dan dianggarkan pada perubahan APBD sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya
- Dana Alokasi Khusus (Sisa DAK 2015) Bidang Kehutanan Tahun 2015 sebesar Rp.316.040.909,- yang tidak dapat dilaksanakan akibat ketidaksesuaian peraturan / petunjuk teknis dan dianggarkan pada perubahan APBD sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya

#### **F. Akuntabilitas Keuangan**

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 14.784.017.010,32 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.215.570.418,32 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.568.446.592,- Sedangkan dari sektor pendapatan Target Pertanian adalah sebesar Rp. 345.042.720,- .

Rincian aspek keuangan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi dapat dilihat dalam tabel sbb :

Tabel 25. Rincian Aspek Keuangan Dinas Pertanian

No	URAIAN	ANGGARAN		
		JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Pendapatan	345.042.720	299.674.350	86,85
2	Belanja	14.784.017.010,32	10.439.391.291	70,61
	- Tidak Langsung	5.215.570.418,32	5.090.805.491	97,61
	- Langsung	9.568.446.592	5.325.573.200	55,90

Sementara itu Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi ditambah dengan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Sumatera Barat APBN/Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 400.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 354.712.000,- atau 80,56%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26. Realisasi Anggaran APBD/APBN Dinas Pertanian

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
1	3	4	5	6
1	APBD Pemerintah Kota Bukittinggi	14.784.017.010,32	10.439.391.291	70,61
2	APBN/ Tugas Pembantuan (TP)	400.530.000	354.712.000	80,56
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</b>			
No	<b>Pengembangan Sumber Air</b>	<b>192.000.000</b>	<b>192.00.000</b>	<b>100,00</b>
	Rehabilitasi jaringan irigasi	192.0000.000	192.00.000	100,00
1	<b>Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen PSP</b>	<b>92.080.000</b>	<b>54.475.000</b>	<b>59,16</b>
	Pembinaan administrasi kegiatan di Kab/Kota Mendukung Keg. PSP	92.080.000	54.475.000	59,16
	Honor Operasional Satuan Kerja	31.440.000	31.440.000	100%

2	<b>Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</b>	<b>92.080.000</b>	<b>54.475.000</b>	<b>59,16</b>
	Pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	56.440.000	54.433.000	77.61
	Belanja Bahan	7.000.000	5.433.000	77.61
	Belanja Barang Non Operasional lainnya	770.000	770.000	91.67
3	<b>Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100</b>
	Penguatan Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida (KP3)	1.500.000	1.500.000	100
	Belanja Bahan	300.000	300.000	100
	Belanja Jasa Lainnya	2.600.000	2.600.000	100
	Belanja Perjalanan Biasa			
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	2.100.000	2.100.000,-	100
4	<b>Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>53.510.000</b>	<b>53.434.000</b>	<b>99</b>
	Ketenagaan Penyuluh yang diasilitasi	1.800.000	1.800.000	100
	Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya			
	Belanja Bahan	1.200.000	1.200.000	100
	Belanja Barang Non Operasional	600.000	600.000	100
5	<b>Kelembagaan Petani yang difasilitasi dan dikembangkan</b>	<b>12.870.000</b>	<b>12.870.000</b>	<b>100</b>
	Kursus Tani Desa (KTD)	6.795.000	6.795.000	100
	Rembug Tani Desa	3.375.000	3.375.000	100
	Bantuan Transpor Penyuluh	2.700.000	2.700.000	100
6	<b>Kelembagaan Penyuluhan Yang difasilitasi</b>	<b>38.840.000</b>	<b>38.764.000</b>	<b>100</b>
	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kab/Kota</b>	<b>38.840.000</b>	<b>38.764.000</b>	<b>100</b>
	<b>Temu teknis Kabupaten Kota</b>	<b>7.525.000</b>	<b>7.525.000</b>	<b>100</b>
	Belanja Bahan	1.575.000	1.575.000	100
	Honor output kegiatan	100.000	100.000	100
	Belanja Jasa profesi	2.400.000	2.400.000	100
	Belanja perjalanan dinas biasa	3.450.000	3.450.000	100
7	<b>Temu Evaluasi tingkat Kab./ Kota</b>	<b>7.675.000</b>	<b>7.675.000</b>	<b>100</b>
	Belanja Bahan	1.575.000	1.575.000	100
	Honor Output Kegiatan	100.000	100.000	100
	Belanja Jasa Profesi	2.400.000	2.400.000	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.600.000	3.600.000	100
8	<b>Pengembangan Data Base sistem Informasi Penyuluhan</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000,-</b>	<b>100</b>
	Belanja bahan	1.000.000	999.000	100

	Honor Output Kegiatan	600.000	600.000	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	660.000	660.000	100
9	<b>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kota</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>100</b>
	Perjalanan Dinas Biasa	440.000	440.000	100
	<b>Administrasi Kegiatan</b>	<b>18.040.000</b>	<b>18.040.000</b>	<b>100</b>
	Honor Operasional Satuan Kerja	9.000.000	9.000.000	100
	Belanja bahan	3.000.000	3.000.000	100
	<b>TOTAL</b>	<b>400.530.000</b>	<b>354.712.000</b>	<b>88.56</b>

Anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kota Bukittinggi tahun 2016 adalah sebesar Rp. 14.784.017.010,32,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.439.391.291,- atau 70,61 %, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 27. Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2016**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)	SISA ANGGARAN
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>947,736,450.00</b>	<b>881,364,760.00</b>	<b>93.00</b>	<b>66,371,690.00</b>
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,520,000.00	1,484,500.00	97.66	35,500.00
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,500,000.00	31,985,969.00	87.63	4,514,031.00
3)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	180,100,600.00	138,494,221.00	76.90	41,606,379.00
4)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	84,791,300.00	82,881,900.00	97.75	1,909,400.00
5)	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,000,000.00	9,730,000.00	88.45	1,270,000.00
6)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26,593,800.00	23,823,700.00	89.58	2,770,100.00
7)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,983,450.00	13,976,450.00	99.95	7,000.00
8)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,697,300.00	3,306,700.00	89.44	390,600.00
9)	Penyediaan Makanan Dan Minuman	11,750,000.00	11,679,600.00	99.40	70,400.00
10)	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	290,000,000.00	280,885,560.00	96.86	9,114,440.00
11)	Penyediaan Jasa Pegawai Non Pns	238,800,000.00	234,212,160.00	98.08	4,587,840.00
12)	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	49,000,000.00	48,904,000.00	99.80	96,000.00

	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>62,541,500.00</b>	<b>62,516,000.00</b>	<b>99.96</b>	<b>25,500.00</b>
1)	Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,300,000.00	10,288,000.00	99.88	12,000.00
2)	Pengadaan Peralatan Kantor	46,491,500.00	46,491,500.00	100.00	0.00
3)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,750,000.00	5,736,500.00	99.77	13,500.00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>32,769,700.00</b>	<b>98.41</b>	<b>530,300.00</b>
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	33,300,000.00	32,769,700.00	98.41	530,300.00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>97,132,875.00</b>	<b>83,804,502.00</b>	<b>86.28</b>	<b>13,328,373.00</b>
1)	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	549,300.00	543,000.00	98.85	6,300.00
2)	Penyusunan Rencana Kerja Dan Keuangan Skpd	947,000.00	947,000.00	100.00	0.00
3)	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	1,168,500.00	1,168,500.00	100.00	0.00
4)	Penyusunan Renstra Skpd Tahun 2015-2020	5,006,000.00	4,606,000.00	92.01	400,000.00
5)	Penyediaan Penunjang Pengelolaan Dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	89,462,075.00	76,540,002.00	85.56	12,922,073.00
					0.00
<b>A</b>	<b>URUSAN KEHUTANAN</b>	<b>937,805,133.00</b>	<b>32,153,700.00</b>	<b>3.43</b>	<b>905,651,433.00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>	<b>937,805,133.00</b>	<b>32,153,700.00</b>	<b>3.43</b>	<b>905,651,433.00</b>
1)	Pemeliharaan Tahun II Penghijauan Bantaran Sungai Kawasan Ngarai	4,074,000.00	3,622,500.00	88.92	451,500.00
2)	Pencanangan Bulan Menanam Pohon	19,104,350.00	16,168,200.00	84.63	2,936,150.00
3)	Pemeliharaan Bibit Tanaman Penghijauan Untuk Kota Bukittinggi	14,233,000.00	12,363,000.00	86.86	1,870,000.00
4)	Dak Bidang Kehutanan (Sisa DAK 2010 - 2014)	584,352,874.00	0.00	0.00	584,352,874.00
5)	Dak Bidang Kehutanan (Sisa DAK 2015)	316,040,909.00	0.00	0.00	316,040,909.00
					0.00
<b>B</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>	<b>3,375,791,096.00</b>	<b>2,979,920,574.00</b>	<b>88.27</b>	<b>395,870,522.00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFROMASI/STATISTIK DAERAH</b>	<b>21,505,850.00</b>	<b>20,123,300.00</b>	<b>93.57</b>	<b>1,382,550.00</b>
1)	Penyusunan Data Statistik Dan Informasi Pertanian	21,505,850.00	20,123,300.00	93.57	1,382,550.00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>32,901,600.00</b>	<b>31,389,400.00</b>	<b>95.40</b>	<b>1,512,200.00</b>
1)	Revitalisasi, Peningkatan Kelas Dan Penilaian, Pemberian Penghargaan Kelembagaan Tani	13,927,200.00	13,143,400.00	94.37	783,800.00

2)	Pelatihan Dan Pembinaan GAPOKTAN dan LKMA	18,974,400.00	18,246,000.00	96.16	728,400.00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>102,309,500.00</b>	<b>87,747,210.00</b>	<b>85.77</b>	<b>14,562,290.00</b>
1)	Layanan Informasi Pasar	13,882,400.00	13,812,400.00	99.50	70,000.00
2)	Festival/Pameran Hortikultura dan Pangan	47,668,700.00	40,128,210.00	84.18	7,540,490.00
3)	Promosi Pemasaran Hasil Pertanian	29,334,100.00	23,082,300.00	78.69	6,251,800.00
4)	Peningkatan Operasional Sarana dan Prasarana Pasar Ternak	11,424,300.00	10,724,300.00	93.87	700,000.00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>1,763,627,246.00</b>	<b>1,441,971,475.00</b>	<b>81.76</b>	<b>321,655,771.00</b>
1)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dana Sinergis TP)	8,887,400.00	7,446,450.00	83.79	1,440,950.00
2)	Penangkaran Jabal Benih Padi	11,146,400.00	9,561,200.00	85.78	1,585,200.00
3)	Pengembangan Tanaman Hias	26,198,800.00	25,668,125.00	97.97	530,675.00
4)	Pengembangan Tanaman Biofarmaka	17,500,000.00	17,392,775.00	99.39	107,225.00
5)	Pengembangan Kultur Jaringan	29,388,200.00	26,146,400.00	88.97	3,241,800.00
6)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	4,865,800.00	1,030,600.00	21.18	3,835,200.00
7)	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	31,136,100.00	30,737,100.00	98.72	399,000.00
8)	Pengembangan Kawasan Komoditi Kopi	12,000,000.00	11,751,825.00	97.93	248,175.00
9)	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK 2016)	1,597,622,500.00	1,312,237,000.00	82.14	285,385,500.00
10)	DAK Bidang Pertanian (Sisa DAK 2015)	24,882,046.00	0.00	0.00	24,882,046.00
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN</b>	<b>163,498,800.00</b>	<b>147,125,155.00</b>	<b>89.99</b>	<b>16,373,645.00</b>
1)	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	6,280,000.00	5,640,750.00	89.82	639,250.00
2)	Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	50,272,100.00	40,588,600.00	80.74	9,683,500.00
3)	Penunjang Operasional BPP Model	47,946,700.00	44,740,805.00	93.31	3,205,895.00
4)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung BPP (DAK 2016)	59,000,000.00	56,155,000.00	95.18	2,845,000.00
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>	<b>634,157,400.00</b>	<b>611,234,725.00</b>	<b>96.39</b>	<b>22,922,675.00</b>
1)	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	44,850,900.00	41,745,500.00	93.08	3,105,400.00
2)	Pengawasan Bahan Pangan Asal	4,258,900.00	3,960,200.00	92.99	298,700.00

	Hewan				
3)	Penanggulangan Flu Burung	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4)	Pelatihan Dog Cather (Penangkapan Anjing)	8,808,400.00	6,348,400.00	72.07	2,460,000.00
5)	Penunjang Operasional Poskeswan	184,478,200.00	181,094,125.00	98.17	3,384,075.00
6)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dak 2016)	386,761,000.00	378,086,500.00	97.76	8,674,500.00
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>	<b>91,978,750.00</b>	<b>83,663,200.00</b>	<b>90.96</b>	<b>8,315,550.00</b>
1)	Pemeliharaan Kuda Bibit Pejantan	41,978,750.00	41,024,550.00	97.73	954,200.00
2)	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	50,000,000.00	42,638,650.00	85.28	7,361,350.00
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN</b>	<b>542,048,350.00</b>	<b>510,640,909.00</b>	<b>94.21</b>	<b>31,407,441.00</b>
1)	Penunjang Operasional RPH	178,995,850.00	158,700,909.00	88.66	20,294,941.00
2)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan RUMINANSIA (DAK 2016)	363,052,500.00	351,940,000.00	96.94	11,112,500.00
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>23,763,600.00</b>	<b>23,012,600.00</b>	<b>96.84</b>	<b>751,000.00</b>
1)	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP)	23,763,600.00	23,012,600.00	96.84	751,000.00
					0.00
<b>C</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>4,114,139,538.00</b>	<b>1,276,056,564.00</b>	<b>31.02</b>	<b>2,838,082,974.00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM PEMBUDIDAYA IKAN</b>	<b>14,650,500.00</b>	<b>13,678,400.00</b>	<b>93.36</b>	<b>972,100.00</b>
1)	Bimtek Budidaya Ikan Hias	14,650,500.00	13,678,400.00	93.36	972,100.00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	<b>179,443,700.00</b>	<b>170,238,564.00</b>	<b>94.87</b>	<b>9,205,136.00</b>
1)	Penunjang Operasional BBIH	179,443,700.00	170,238,564.00	94.87	9,205,136.00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>61,740,500.00</b>	<b>57,692,600.00</b>	<b>93.44</b>	<b>4,047,900.00</b>
1)	Uji Mutu Hasil Perikanan	6,150,000.00	5,874,750.00	95.52	275,250.00
2)	Lomba Masak Ikan dan Jingle	55,590,500.00	51,817,850.00	93.21	3,772,650.00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>3,858,304,838.00</b>	<b>1,034,447,000.00</b>	<b>26.81</b>	<b>2,823,857,838.00</b>
1)	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK 2016)	1,121,630,000.00	1,034,447,000.00	92.23	87,183,000.00
2)	DAK Bidang Kelautan Dan Perikanan (Sisa DAK 2010-2014)	2,694,497,292.00	0.00	0.00	2,694,497,292.00
3)	DAK Bidang Kehutanan (Sisa DAK 2015)	42,177,546.00	0.00	0.00	42,177,546.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>9,568,446,592.00</b>	<b>5,348,585,800.00</b>	<b>55.90</b>	<b>4,219,860,792.00</b>



**BAB IV**

**PENUTUP**

---

**A. Kesimpulan**

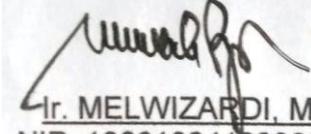
1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2016, Dinas Pertanian Kota Bukittinggi telah merencanakan dan melaksanakan 63 (enam puluh tiga) kegiatan diluar kegiatan rutin dalam 16 (enam belas) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2016, untuk mendukung pencapaian 12 (dua belas) sasaran dalam 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja (outcomes) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 12 (dua belas) Sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
  - Terlaksana dengan “memuaskan” sebanyak 25 (dua puluh lima ) indikator sasaran strategis.
  - Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 1 (dua) indikator strategis
  - Terlaksana dengan “baik” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis
  - Terlaksana dengan “cukup baik” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis
  - Terlaksana dengan “agak kurang ” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis
  - Terlaksana dengan “kurang ” sebanyak 2 (dua ) indikator sasaran strategis

**B. Strategi Pemecahan Masalah**

1. Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan kembali dalam Renja tahun 2017.
2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap PPTK yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Bukittinggi, Maret 2017

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
KOTA BUKITTINGGI**



Ir. MELWIZARDI, M.Si  
NIP. 196610241993081001